

ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INDEKS GINI KABUPATEN SUMEDANG

Fitriana Dewi Sumaryana¹⁾ Toufiq Agung Pratomo Sugito
Putra²⁾ Abdul Hakim³⁾

¹Universitas Koperasi Indonesia, author@gmail.com

²Universitas Koperasi Indonesia, fitri_dewi@ikopin.ac.id

³Universitas Koperasi Indonesia,

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesenjangan pendapatan dengan menggunakan pendekatan Indeks Gini Ratio. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui pengamatan dan pendataan laporan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumedang maupun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sumedang, seperti Kabupaten Dalam Angka maupun indikator Kesejahteraan hasil Sensus Nasional. Data yang bersumber dari Bappeda dan BPS berupa data Produk Domestik Regional Bruto perkapita atas Dasar Harga Konstan, dan data konsumsi rata-rata konsumsi per kapita. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari indikator PDRB atas dasar harga konstan mengalami penurunan di tahun 2020 karena adanya pandemic Covid-19. Indeks Gini Kabupaten Sumedang periode tahun 2016 – 2020 berada pada kategori sedang (>0,384) atau pada level moderat.

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, PDRB, Indeks Gini.

ABSTRACT

This study aims to analyze the level of income inequality by using the Gini Ratio Index approach. Sources of data used in this study are primary and secondary data obtained through observation and data collection reports sourced from the Central Statistics Agency (BPS) of Sumedang Regency and the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) of Sumedang Regency, such as the Regency in Figures and the Welfare indicators from the Census. National. Data sourced from Bappeda and BPS in the form of data on Gross Regional Domestic Product per capita on the basis of constant prices, and consumption data on average consumption per capita. The results showed that economic growth as seen from the GRDP indicator on the basis of constant prices decreased in 2020 due to the Covid-19 pandemic. The Gini Index of Sumedang Regency for the period 2016 – 2020 is in the moderate category (> 0.384) or at a moderate level.

Keywords: Economic Growth, DRDP, Inflation, Gini Ratio.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang terjadi ketika peningkatan pendapatan riil penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang diiringi dengan perbaikan sistem kelembagaan. Pembangunan ekonomi saling berkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang dapat meningkatkan pembangunan ekonomi sehingga dapat bisa dilihat serta dianalisis baik secara nasional maupun regional.

Pertumbuhan ekonomi nasional maupun

regional dapat dilihat dari beberapa indikator seperti: 1) kenaikan produk domestik bruto; 2) akumulasi modal; 3) kemajuan teknologi; 4) pertumbuhan penduduk yang akan mendorong angkatan kerja.

Pertumbuhan penduduk juga dapat bertindak sebagai pendorong atau penghambat pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan menaikkan jumlah tenaga kerja sehingga memungkinkan suatu daerah menambah jumlah pendapatan daerah. Namun, jika pertumbuhan penduduk dan kesempatan kerja

tidak seimbang, akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat.

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Sumedang selama tahun 2015 sampai dengan 2019 menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 6,32% yang mana pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 5,83%.

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas harga konstan. Berdasarkan data BPS, PDRB Kabupaten Sumedang atas harga konstan berdasarkan lapangan usaha setiap tahunnya mengalami peningkatan pada tahun 2015 sampai dengan 2019, dengan rata-rata kenaikan sebesar Rp1,2 triliun. Jika dihitung dengan menggunakan nilai PDRB atas dasar berlaku, tahun 2015 sampai dengan 2019 terus mengalami kenaikan sebesar Rp35,4 triliun dengan rata-rata kenaikan sebesar Rp2 triliun.

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu wilayah di Propinsi Jawa Barat yang memiliki luas wilayah 155. 872 Ha yang terdiri dari 26 kecamatan, 270 desa, dan 7 kelurahan memiliki potensi ekonomi yang berbeda-beda.

Wilayah-wilayah yang ditopang oleh sektor industri tingkat perekonomiannya lebih cepat dibandingkan wilayah lainnya, tetapi ada juga wilayah yang bukan wilayah industri tetapi wilayah tersebut ditopang oleh sektor properti yang penduduknya relatif maju, dan ada pula wilayah yang ditopang oleh sektor pertanian tetapi tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakatnya relatif rendah. Berdasarkan fenomena tersebut maka perlu dikaji indikator-indikator ekonomi makro untuk memberikan gambaran tentang perkembangan ekonomi Kabupaten Sumedang yang hasilnya bisa digunakan untuk bahan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

KAJIAN TEORITIS

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa

akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Ada tiga pendekatan dalam menghitung nilai PDRB, yaitu dengan pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran.

Perhitungan PDRB dengan menggunakan metode produksi diperoleh dengan menjumlahkan nilai pasar dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor dalam perekonomian. Sektor-sektor ekonomi dikelompokkan menjadi 9 sektor, yaitu: (1) pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalan, (3) industri pengolahan, (4) listrik, gas dan air bersih, (5) konstruksi, (6) perdagangan, hotel dan restoran, (7) pengangkutan dan komunikasi, (8) keuangan, properti dan jasa perusahaan, (9) jasa-jasa (termasuk jasa pemerintah).

Perhitungan PDRB dengan menggunakan metode pendapatan diperoleh dengan menjumlahkan seluruh pendapatan berbagai faktor produksi. Faktor produksi tersebut adalah tenaga kerja, modal, tanah, dan keahlian/kewirausahaan. Masing-masing dari faktor produksi tersebut akan menghasilkan pendapatan atau balas jasa yang berbeda. Balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi. Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya, mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

Pendekatan pengeluaran PDRB diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai pasar dari seluruh permintaan akhir (*final demand*) atas output yang dihasilkan dalam perekonomian. Pengeluaran akhir yang dihitung meliputi penjumlahan nilai pasar dari permintaan sektor rumah tangga untuk barang-barang konsumsi dan jasa-jasa (C), permintaan sektor bisnis barang-barang investasi (I), pengeluaran pemerintah untuk barang-barang dan jasa-jasa (G), dan pengeluaran sektor luar negeri untuk kegiatan ekspor dan impor (X-M).

Secara konsep, dari ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka akhir yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama

dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi.

2. Indeks Gini

Indeks Gini secara luas digunakan untuk mengukur ketimpangan dan distribusi pendapatan. Ketimpangan pendapatan atau kesenjangan dapat diartikan sebagai perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin, yang tercermin dari adanya perbedaan pendapatan. Ketimpangan antar daerah juga merupakan hal yang umum terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam dan perbedaan demografi yang terdapat di wilayah masing-masing. Perbedaan tersebut membuat kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda, sehingga memunculkan istilah daerah maju dan terbelakang.

Indeks Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi seragam (uniform) yang mewakili presentasi kumulatif penduduk. Formulasi yang digunakan untuk menghitung Indeks Gini adalah sebagai berikut:

$$GC = 1 - \sum (X_i - X_{i-1})(y_i + y_{i+1})$$

GC = *Gini Coefficient* (Gini Ratio)

X_i = Persentase Jumlah Penduduk Kumulatif ke- i

Y_i = Persentase Jumlah Pendapatan Penduduk Kumulatif ke- i

Nilai indeks gini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Semakin besar nilai indeks gini maka akan semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pendapatan antar kelompok penduduk.

Standar penilaian Indeks Gini adalah sebagai berikut:

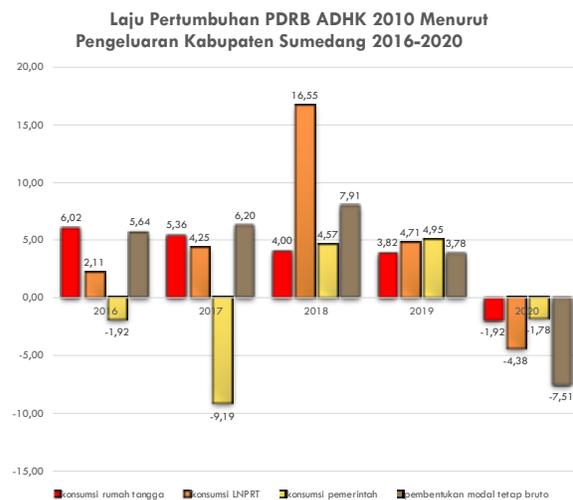
- $GR < 0.4$ dikategorikan sebagai ketimpangan rendah
- $0.4 < GR < 0.5$ dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (Moderat)
- $GR > 0.5$ dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis angka indeks gini. Penelitian ini mencatat, menuturkan, mengklasifikasikan, dan menganalisis serta mendeskripsikan data dan informasi-informasi yang ada mengenai kenyataan yang terjadi mengenai indeks gini. Data utama yang digunakan adalah data sekunder, tentang PDRB dan indeks gini dengan menggunakan proxy produksi lapangan usaha sebagai pengganti data pendapatan masyarakat, karena data pendapatan sendiri di Indonesia masih belum tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan cerminan dari seluruh kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah, dilihat dari tahun 2016 - 2020 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumedang selalu mengalami kenaikan yang fluktuatif dari tahun ke tahun.



Gambar di atas menggambarkan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 menurut pengeluaran. Kontribusi kenaikan pengeluaran terbesar masih ditopang dari sisi pengeluaran konsumsi. Meskipun pada tahun 2020 semua pengeluaran mengalami penurunan yang disebabkan oleh pandemic Covid-19, kecenderungan tren naik dari laju pertumbuhan PDRB mencerminkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat suatu wilayah umumnya didekati dengan dua pendekatan (proxy) pendapatan yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita dan Pengeluaran Konsumsi Per kapita. Walaupun kedua nilai tersebut tidak menggambarkan pendapatan riil penduduk akan tetapi secara empiris terbukti dapat memberikan gambaran pendapatan penduduk untuk dapat menjadi indikator kesejahteraan masyarakat suatu wilayah.

PDRB per kapita Kabupaten Sumedang dari tahun 2016 – 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan tiap tahunnya. Perkembangan pendapatan per kapita Kabupaten Sumedang tahun 2016 – 2020 dapat dilihat selengkapnya dalam tabel berikut ini:

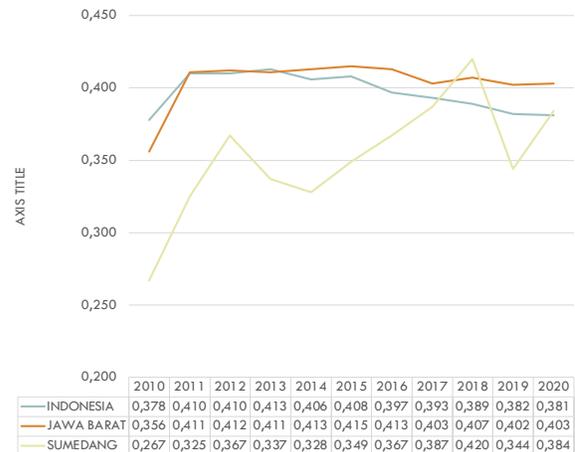
Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Total Konsumsi Rumah Tangga					
ADHB (Miliar Rp)	19353,6	21000,5	22694,8	24367,8	24372,6
ADKH 2010 (Miliar Rp)	8091,5	8397,3	8675,2	8931,9	8550,3
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	71,66	70,85	69,76	68,76	68,67
Rata-rata konsumsi per Kapita (000 Rp)					
ADHB (Miliar Rp)	16945,7	18318,1	19736,2	21145,3	21112,3
ADHK 2010	12257,7	12865,3	13339,3	13818,4	13528,9
Pertumbuhan					
Total Konsumsi RT (ADHK)	6,02	5,36	4	3,82	-1,92
Per Kapita (ADHK)	5,57	4,96	3,68	3,59	-2,09
Jumlah penduduk (000 org)	1142	1146	1150	1152	11540,42
Pertumbuhan penduduk (%)	0,42	0,38	0,3	0,22	0,18

Sumber: BPS data diolah

Tingkat pendapatan pendapatan suatu wilayah selain dari kemampuan ekonomi wilayah tersebut juga tergantung jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut, wilayah yang mempunyai nilai PDRB tertinggi belum tentu memiliki PDRB perkapita yang tinggi pula apabila jumlah penduduk wilayah tersebut sangat tinggi.

Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan ketimpangan dalam 11 tahun terakhir, puncaknya di tahun 2018 melampaui ketimpangan di level Nasional dan Provinsi Jawa Barat.

Trend Indeks Gini Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2010-2020



Sumber: BPS data diolah

Berdasarkan grafik di atas ini diketahui bahwa Indeks Gini Kabupaten Sumedang tahun 2018 nilainya melebihi 0,4 tetapi masih berada dalam kategori ketimpangan moderat. Hal ini berarti bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi selalu dalam kategori sedang dengan pemerataan yang cukup tinggi. Hal yang menjadi perhatian bahwa aspek pemerataan menjadi sangat penting di samping tentunya aspek pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Ukuran distribusi pendapatan digunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yakni data total pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga terbagi menjadi dua kelompok, yakni pengeluaran kelompok makanan dan non makanan. Penyebab nilai

Peran Kabupaten Sumedang dalam pembangunan di atas tentunya tidak terlepas dari kuatnya pondasi pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang, yang terdiri dari 26 Kecamatan. Dilihat dari aspek ekonomi, pembangunan ekonomi yang diukur dengan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) pada tahun 2016-2020 selalu mengalami peningkatan.

Terkait dengan visi dan misi RPJMD 2018-2023 mengenai bidang mata pencaharian layak dan berkesinambungan, terdapat tantangan bahwa peningkatan LPE di Kabupaten Sumedang belum berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Walaupun Indeks Gini Kabupaten Sumedang pada tahun 2020 menunjukkan angka ketimpangan rendah yaitu 0,384 namun

pembangunan perlu menjamin bahwa di tingkat kecamatan atau pelosok terdapat pemerataan akses yang lebih berkeadilan terhadap seluruh sumber daya ekonomi di Kabupaten Sumedang.

Dengan demikian untuk mengetahui seberapa besar pemerataan pembangunan, khususnya pemerataan ekonomi di tingkat kecamatan di Kabupaten Sumedang, diperlukan adanya pengukuran distribusi pendapatan di tingkat kecamatan. Salah satu alat yang dapat digunakan adalah Indeks Gini yang merupakan suatu alat untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangian pendapatan relatif antar penduduk suatu negara atau wilayah yang telah diakui secara luas. Lebih lanjut, terkait dengan rencana pembangunan tata ruang yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Sumedang, pengukuran Indeks Gini yang dilakukan secara berkesinambungan diperlukan untuk melihat ada atau tidaknya peningkatan pemerataan pendapatan terkait dengan pembangunan infrastruktur.

KESIMPULAN

Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang selama ini bisa dikatakan membuahkan hasil yang memuaskan karena pertumbuhan pembangunannya yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pembangunan yang mengacu pada peningkatan pertumbuhan akan menjadi timpang apabila hasil dari pembangunan tersebut hanya dinikmati oleh sekelompok masyarakat.

Berdasarkan kajian indikator ketimpangan menggunakan indeks gini, ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kabupaten Sumedang tergolong rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum perbedaan pendapatan antara penduduk di masyarakat tidak terlalu lebar. Akan tetapi gini ratio Kabupaten Sumedang belum mencerminkan pemerataan di tingkat kecamatan, hal tersebut dikarenakan pembangunan di Sumedang masih belum merata di setiap kecamatan. Sehingga diperlukan pengukuran distribusi pendapatan di tingkat kecamatan.

Angka Indeks Gini yang dikeluarkan oleh

BPS belum mencerminkan ketimpangan pendapatan karena sampai saat ini belum ada data tentang pendapatan rumah tangga. Data yang dikumpulkan BPS adalah data pengeluaran yang menjadi proksi pendapatan. Nilai indeks Gini berdasarkan data pengeluaran menghasilkan angka ketimpangan yang lebih baik atau lebih rendah ketimbang data pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R, 2005. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Arsyad, Lincoln, 2009. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFE, Yogyakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2016. Sumedang Dalam Angka. Kantor Statistik Kabupaten Sumedang, Jawa Barat
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2017. Sumedang Dalam Angka. Kantor Statistik Kabupaten Sumedang, Jawa Barat
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2018. Sumedang Dalam Angka. Kantor Statistik Kabupaten Sumedang, Jawa Barat
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2019. Sumedang Dalam Angka. Kantor Statistik Kabupaten Sumedang, Jawa Barat
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2020. Sumedang Dalam Angka. Kantor Statistik Kabupaten Sumedang, Jawa Barat
- Samuelson, Paul A and Nordhaus, W D. 2005. *Economics*. Ed 18th. McGraw-Hill. New York.
- Todaro, M. 2015. *Pembangunan Ekonomi Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.